

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Desa Tulungrejo

Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang merupakan salah satu Desa yang berada paling ujung (selatan) dari Desa lainnya di Kecamatan Donomulyo) dengan letak geografisnya adalah 08°19'81" LS – 112°29'64" BT. Batas Desa Tulungrejo yaitu, Timur : Kecamatan Pagak, Selatan : Samudra Hindia, Barat : Desa Banjarejo, dan Utara : Kecamatan Pagak. Topografi Desa Tulungrejo adalah Lereng dan Perbukitan. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tulungrejo adalah petani dengan jumlah penduduknya sekitar 3.595 jiwa dan luas wilayah desanya 16,86 km² (Sukandar dkk., 2016).

B. Desa Sumbermanjing Kulon

Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang merupakan daerah yang secara administratif berada pada posisi geografis 08°16'58" LS – 08°18'43" LS, dan 112° 30'47" BT – 112°28'41" BT. Batas Desa Sumbermanjing Kulon yaitu, Selatan : Samudra Hindia, Barat : Desa Banjarejo, Timur : Sumberpandan, dan Utara : Desa Tanjung. Desa Sumbermanjing Kulon terbagi atas 2 (dua) dusun yaitu Dusun Kulon Kali dan Dusun Krajan dengan luas wilayah 1.025,5 Ha. Jumlah penduduk Desa Sumbermanjing Kulon terdiri dari 2.475 jiwa dengan pekerjaan utamanya adalah petani dan wiraswasta. Secara sosial ekonomi, masyarakat Sumbermanjing Kulon sudah terbilang makmur karena

program Desa sudah terplanning dengan baik, seperti adanya kemandirian keuangan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu (posyandu), dan adanya organisasi kecil-kecilan yang dilaksanakan oleh para remaja yang ada di desa.

2.2 Pengertian Hutan Rakyat

Menurut Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 (E), hutan rakyat atau disebut juga hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pengertian hutan rakyat berdasarkan pasal tersebut digunakan untuk membedakan hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka walaupun hutan adat dikelola oleh rakyat tetapi tidak dapat disebut sebagai hutan hak atau hutan rakyat, karena status kepemilikan lahannya dimiliki oleh negara (Annazili, 2013).

Hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat diatas tanah milik rakyat dengan jenis tanaman hutan adalah hutan rakyat. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999) memberikan batasan yang termasuk hutan rakyat yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk didominasi tanaman perkayuan, dan tanaman tahun pertama minimal 500 batang. Hutan rakyat sebagai salah satu aktivitas dalam bertani mampu menciptakan peluang bagi pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar, papan, dan sebagainya. Namun sebagian besar petani lebih memilih untuk menjual kayu dan hanya menggunakan kayu untuk digunakan sendiri kalau terpaksa (Sanudin, 2009).

Hutan rakyat dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga walaupun hutan tersebut dimiliki oleh pegawai pemerintah maka tetap disebut

hutan rakyat (Suharjito 2000). Luas pemilihan hutan rakyat umumnya tidak seluas hutan negara seperti yang dinyatakan oleh Hardjanto (2003), luasan hutan rakyat yang dimiliki oleh petani, baik golongan petani kecil, menengah, maupun besar, sebagian besar relatif sempit (kurang dari 1 hektar). Walaupun tidak seluas hutan negara, namun hutan rakyat telah mampu menyumbangkan manfaat yang sangat besar bagi sektor perdagangan, pertanian, lingkungan, dan sosial-budaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardjanto (2003) yang menyatakan bahwa usaha hutan rakyat merupakan usaha kecil dan menengah. Usaha hutan rakyat dapat memberikan pengaruh positif bagi banyak sektor seperti rumah tangga, ketenagakerjaan, industri, keuangan, angkutan, serta sektor lingkungan hidup.

2.3 Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat dapat dibagi menjadi tiga sub sistem yang saling terkait, yaitu sub sistem produksi, sub sistem pengelolaan hasil, dan sub sistem pemasaran hasil (KWLM 2010). Sub sistem produksi meliputi kegiatan persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penenaman (KWLM 2010). Kegiatan persiapan lahan meliputi pengolahan tanah dan pembersihan lahan (Prabowo 2000). Persiapan bibit di hutan rakyat umumnya diupayakan dengan cara menyemai sendiri atau mengambil anakan alami. Dalam proses ini, petani tidak melakukan seleksi yang baik dalam memilih benih ataupun anakan alami karena keterbatasan jumlah benih ataupun anakan alami tersebut, sehingga tidak semua bibit yang terkumpul kualitasnya baik (Prabowo, 2000).

Penanaman terdiri dari pengaturan jarak tanam, waktu penanaman, dan penetapan daur. Pemeliharaan terdiri dari kegiatan penyiangan, pendangiran,

pemupukan, pemengkasian cabang, dan pemberantasan hama dan penyakit. Pemanenan pada hutan rakyat pada umumnya diserahkan kepada tengkulak atau lembaga yang berusaha menanganinya seperti koperasi kayu, walaupun sudah ada juga kelompok tani hutan yang melakukan kegiatan tersebut secara mandiri. Pemanenan terdiri dari penebangan, penyaradan ke tempat penimbunan kayu, dan pengangkutan ke penggergajian atau pabrik kayu (Pramono, 2010).

Sub sistem pengolahan hasil adalah proses untuk menghasilkan produk akhir yang akan dijual atau dipakai sendiri. Kebanyakan petani hutan rakyat saat ini masih jarang melakukan pengolahan hasil hingga ke produk yang bernilai tinggi karena kebanyakan masih berfikir praktis untuk menyerahkan kegiatan pengolahan hasil kepada tengkulak. Hal ini juga didorong oleh keterbatasan dana (Hardjanto, 2003).

Sub sistem pemasaran hasil adalah kegiatan penjualan kayu rakyat dari petani (produsen) kepada pembeli (konsumen). Proses ini dapat dilakukan baik melalui perantara tengkulak ataupun tanpa perantara tengkulak (Hardjanto, 2003).

2.4 Manfaat Hutan Rakyat

Manfaat hutan rakyat sangat dirasakan oleh masyarakat, selain sebagai investasi ternyata juga dapat memberikan tambahan penghasilan yang dapat diandalkan. Masyarakat bisa memanfaatkan kayu yang ditanam di lahan milik sendiri untuk berbagai keperluan terutama untuk mencukupi kebutuhan kayu sebagai bahan baku bangunan atau mebel. Sewaktu-waktu mereka menjual kayunya ketika ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, akan tetapi tidak sedikit dari mereka

yang mewariskan pohon yang masih berdiri untuk anak cucu mereka (Sukadaryati, 2006).

Hutan rakyat pada umumnya dan hutan rakyat kayu pada khususnya menghasilkan manfaat lingkungan yang tinggi. Manfaat lingkungan hutan rakyat kayu memang tidak setinggi manfaat lingkungan hutan rakyat campuran yang memiliki beragam jenis tanaman dan beberapa strata tajuk. Hutan rakyat kayu juga memiliki akar pohon yang dalam, tajuk antar pohon yang saling menutupi dan tanaman bawah sehingga mempunyai peranan penting dalam memelihara tat air dan kesuburan tanah, mengurangi bahaya banjir, longsor, erosi dan berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global (Puspitojati, 2014).

Hutan rakyat telah memberikan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan oleh penduduk desa pemilik hutan rakyat. Manfaat yang dihasilkan adalah kayu yang digunakan untuk bahan bangunan guna memperbaiki kondisi rumah mereka yang dulunya terbuat dari bambu. Selain itu, petani dapat memperoleh tambahan pendapatan dari menjual kayu hasil hutan rakyat baik dalam bentuk pohon berdiri maupun dalam bentuk kayu bakar. Penjualan kayu hasil hutan rakyat ini biasanya dilakukan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak dan keuangan yang ada kurang mampu mencukupi (Suharjito, 2000).

Ketika pembangunan hutan rakyat berhasil maka akan ada sumbangsih positif terhadap pembangunan nasional, menurut Simon (1995) sumbangsih tersebut dalam bentuk :

- a) Meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan ikutan
- b) Memperluas aksesibilitas dan kesempatan kerja di pedesaan

- c) Memperbaiki sistem tata air dan meningkatkan proses penguraian CO₂ dan polutan lain di udara karena adanya peningkatan proses fotosintesis di permukaan bumi
- d) Dari proses fotosintesis dapat menjaga kadar oksigen udara segar tetap pada tingkat yang menguntungkan bagi makhluk hidup, dan
- e) Menyediakan habitat untuk menjaga keanekaragaman hayati

Pembangunan hutan rakyat saat ini perlu mendapat perhatian lebih, karena merupakan program nasional yang sangat strategis, baik ditinjau dari kepentingan nasional dari segi pandangan global, meliputi aspek ekonomi, ekologis maupun sosial budaya. Hutan rakyat yang bermula dari kegiatan penghijauan lahan kritis milik masyarakat, sekarang sudah berkembang menjadi salah satu bidang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha lainnya serta menunjang pemenuhan bahan baku industri. Di pulau jawa, hutan rakyat disamping berasal dari kegiatan program-program bantuan pemerintah, juga dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya murni baik pada lahan kritis maupun lahan produktif. Hal ini disebabkan masyarakat sudah merasakan adanya nilai tambah dari usaha hutan rakyat. Harga komoditas kayu rakyat pun meningkat dari tahun ke tahun, sehingga telah memberi peluang yang besar bagi pengembangan hutan rakyat dan peningkatan kesejahteraan (Widiarti, 2000).

2.5 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok adalah tempat beberapa orang bergaul satu dengan yang lain dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini kelompok tani hutan berarti orang yang bergaul satu

dengan yang lain dengan tujuan utama memajukan hutan yang mereka kelola. Kelompok dapat bersifat terorganisir memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengorganisir tugas-tugas tertentu (Santoso, 2006).

Kelompok tani hutan pada dasarnya sama dengan kelompok yang lain, memiliki kelas sosial dan stratifikasi sosial. Kelas sosial dan stratifikasi sosial terbentuk karena dalam sebuah kelompok ada perbedaan tanggung jawab dan tingkatan nilai kekuatan (Santoso 2006). Maka dalam kelompok tani hutan ada ketua, sekretaris, dan pengurus yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani hutan juga mengalami dinamika kelompok.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59/Menhut-II/2014 Pasal 1, Kelompok tani hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun hilir.

2.6 Kelompok Tani Hutan Rakyat Ber-SVLK

Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) ber-SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) merupakan kelompok tani yang sudah memiliki Sertifikat dari pihak pemberi Sertifikasi Legalitas Kayu.

Hutan rakyat yang sudah bersertifikat SVLK memiliki manfaat bagi Anggota Kelompok yakni :

- a. Kayu Hutan Rakyat yang sudah memiliki sertifikat diakui asal usul secara jelas oleh para pihak
- b. Diperkenankan menggunakan logo V-Legal dalam pemasaran, pengemasan produk, dan pengiklanan produk kayu (*branding*)
- c. Kayu produk hutan rakyat lebih mudah diterima untuk memasok bahan baku kepada industri yang sudah bersertifikat
- d. Petani mempunyai posisi tawar (keuntungan petani 10% daripada nilai kayu)
- e. Tidak dilakukan pengecekan / inspeksi acak
- f. Memberikan penguatan internal bagi anggota kelompok untuk berpikiran maju, visioner dan terkoordinasi

Manfaat secara tidak langsung dari hutan rakyat yang sudah bersertifikat SVLK adalah :

- a. Memudahkan pemerintah dalam pendataan, membina dan mengembangkan potensi hutan rakyat
- b. Memberikan posisi tawar yang lebih tinggi bagi petani
- c. Memberikan edukasi positif baik petani, produsen, konsumen dan masyarakat secara umum untuk menggunakan bahan baku legal

Pemberlakuan sertifikasi kayu (SVLK) mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P 38/ Menhut II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak (P.38/2009). Berdasarkan ketentuan tersebut, SVLK memiliki definisi sebagai persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu dan produk kayu yang dibuat berdasar kesepakatan para pihak di sektor

kehutan. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifer, metode verifikasi, dan norma penilaian. Itu berarti, kayu disebut legal bila kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan, yakni dengan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan P.38/2009 dimaksudkan untuk menuju pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), serta penerapan tata-kelola kehutan, pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya.

Uraian di atas, secara normatif SVLK tampak memiliki beberapa keunggulan. Untuk menjamin independensi dan akuntabilitas, verifikasi LK dilakukan oleh lembaga independen, yakni lembaga verifikasi legalitas kayu (LV-LK). Dalam menjalankan fungsinya di situ, LV-LK wajib mengembangkan mekanisme konsultasi publik. Sementara, untuk bisa menjadi LV-LK perlu akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bukan perangkat kerja Kementerian Kehutan. Dan ada beberapa langkah untuk menjamin transparansi. Pertama, sistem yang memastikan bahwa hasil verifikasi LV-LK disampaikan ke auditee yaitu unit manajemen yang diverifikasi. Kedua, ada mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan. Ketiga, LSM atau masyarakat madani di bidang kehutan dan masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi unit manajemen yang diverifikasi dapat menjadi lembaga pemantau independen (LPI). Kempat, LPI tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pihak-pihak yang ditunjuk dalam penyelesaian keberatan (LP-VI, KAN dan Kementerian Kehutan).

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi KTHR yang sudah memiliki sertifikasi kayu (SVLK).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi KTHR Wono Mulyo Lestari Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.